

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 12 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (halaman 9)	Selasa, 12 Maret 2019	Terowongan Nanjung Kontribusi Solusi Atasi Banjir Bandung	Pembangunan Terowongan Nanjung yang terbengkalai 15 tahun diharapkan beroperasi 2019. Terowongan sepanjang 230 meter akan mengatasi banjir di wilayah cekung Bandung. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) DAN Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, mempercepat pembangunan Terowongan Nanjung di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Tunnel (terowongan) air yang akan menjadi salah satu solusi mengurangi banjir di cekungan Bandung ini targetkan selesai akhir 2019," ujar Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi.
2	Media Indonesia (halaman 14)	Selasa, 12 Maret 2019	Sertifikasi Pekerja Konstruksi Ditingkatkan	MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari sekitar 8 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru 600 ribu atau 7,5 yang bersertifikat. Presiden Joko Widodo pun berharap peningkatan sertifikasi pekerja konstruksi dapat meningkatkan sebanyak 10 kali lipat. instruksi Presiden ini, kata Basuki, sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian PU-Pera yang kini mulai fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM)
3	Media Indonesia (halaman 15)	Selasa, 12 Maret 2019	Pembangunan Perumahan Terkendala Anggaran	Melalui program sejuta rumah, pemerintah berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup target yang dicanangkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menghadapi kendala dalam pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019. Hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran.
4	Media Indonesia (halaman 15)	Selasa, 12 Maret 2019	Berita Foto	Permukiman Nelayan: Dermaga dan permukiman nelayan Kampung Bahari Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.
5	Kompas (halaman 15)	Selasa, 12 Maret 2019	Lima Desa Pertanyakan Ganti Rugi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengeluarkan 420 hektar tanah ulayat warga dari hutan produksi yang disiapkan untuk Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga turun-temurun bermukim dan bertani di sana, tetapi tidak mendapat ganti rugi karena masuk hutan produksi.
6	Kompas (halaman 15)	Selasa, 12 Maret 2019	Tol Dalam Kota Bandung NS Link Bakal Dibangun	Pembangunan jalan tol dalam kota Bandung, North-South Link atau NS Link, bakal segera dibangun. Infrastruktur yang terintegrasi dengan Jalan Tol Regional Purwakarta-Bandung-Cileunyi ini dinilai bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung.
7	Kompas (halaman 15)	Selasa, 12 Maret 2019	7,6 Juta Tenaga Konstruksi Belum Bersertifikat	Tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi masih minim. Dari 83 juta tenaga konstruksi, baru 616.000 yang terdaftar punya sertifikat kompetensi. Sisanya belum bersertifikat. "Baru 616.000 yang bersertifikat. Dari jumlah itu, yang terampil 400.000," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Aceh, Senin (11/3/2019), di Banda Aceh.
8	Kompas (halaman 21)	Selasa, 12 Maret 2019	Pembangunan Infrastruktur Jakarta Dipercepat	Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan skema pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kota. Dari proyeksi kebutuhan anggaran Rp571 triliun, pemerintah menargetkan sudah ada gambaran skema detail perproyek di akhir april.
9	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Selasa, 12 Maret 2019	Kaltim Selesaikan Pengelolaan Limbah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menyelesaikan sejumlah fasilitas dan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Fasilitas pembuangan dan pengelolaan limbah pun masih harus dituntaskan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin mengatakan bahwa peresmian

				Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang dijadwalkan pada 14 Maret 2019 akan diundur hingga akhir Maret 2019.
10	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Selasa, 12 Maret 2019	WSKT & MPLN Garap Lahan 300 Hektare	Terbaru Pt Waskita Karya Tbk. (WSKT) menggandeng PT Moderland Realty Tbk. (MDLN) bakal menyulap lahan sekira 300 hektare di Bekasi menjadi kawasan pergudangan dan property. Sementara itu, di Subang, PT Lintas Marga Sadaya, operator jalan Cikopo-Palimanan (Cipali), juga mendapat permintaan pembukaan akses tol untuk kawasan industry dari tiga calon investor.
11	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Selasa, 12 Maret 2019	LMAN Kembalikan Rp32,21 Triliun	Lembaga Manajemen Aset Negara telah membayar biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional jalan tol sejumlah Rp32,21 triliun dari tagihan Rp59,39 triliun. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran Rp32,21 triliun yang berasal dari tiga alokasi tahun anggaran yakni tahun anggaran 2016,2017, dan 2018.
12	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Selasa, 12 Maret 2019	Berita Foto: Pekerja Konstruksi Bersertifikat	Pekerja menghadiri pembukaan Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Banda Aceh.

Judul	Terowongan Nanjung Kontribusi Solusi Atasi Banjir Bandung	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Koran Tempo (halaman 9)		
Resume	Pembangunan Terowongan Nanjung yang terbengkalai 15 tahun diharapkan beroperasi 2019. Terowongan sepanjang 230 meter akan mengatasi banjir di wilayah cekung Bandung. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) DAN Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, mempercepat pembangunan Terowongan Nanjung di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Tunnel (terowongan) air yang akan menjadi salah satu solusi mengurangi banjir di cekungan Bandung ini targetkan selesai akhir 2019," ujar Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi.		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TEROWONGAN NANJUNG KONTRIBUSI SOLUSI ATASI BANJIR BANDUNG

Pembangunan Terowongan Nanjung yang terbengkalai 15 tahun diharapkan beroperasi akhir 2019. Terowongan sepanjang 230 meter akan mengatasi banjir di wilayah cekungan Bandung.



Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, mempercepat pembangunan Terowongan Nanjung di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Tunnel (terowongan) air yang akan menjadi salah satu solusi mengurangi banjir di cekungan Bandung ini ditargetkan selesai akhir 2019," ujar Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi.

Menurut Hari, banjir sering terjadi di cekungan Bandung karena wilayah itu merupakan wilayah tangkapan air. Selain itu, hulu Situ Cisanti mengalami erosi serta air Sungai Citarum dan sungai-sungai di sekitarnya tak mampu menampung air.

Tunnel Curug Jompong atau disebut juga Terowongan Nanjung ini dikunjungi Presiden Joko Widodo beserta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bandung Barat Dadang Naser, Minggu, 10 Maret 2019.

Kepada wartawan, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah sudah merencanakan pembangunan terowongan air untuk mencegah banjir sejak 15 tahun lalu, tapi baru terealisasi sekarang. "Kita sudah kaji dan sekarang dalam proses kita kerjakan dua terowongan sepanjang 230 meter dan diameter delapan meter. Kita harapkan bisa atasi banjir di Bandung, utamanya di Dayeuhkolot, Bojongsong, Baleendah, dan sebagainya," kata Presiden.

Terowongan air ini dapat mengurangi luas genangan air sebesar 13 persen atau 700 hektare di cekungan Bandung. Jika diasumsi-



kan satu hektare lahan dihuni 20 ribu Kepala Keluarga (KK), dengan terowongan itu, dapat menyelamatkan 1,4 juta KK.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal SDA, luas genangan air

di Kabupaten Bandung mencapai 3.461 hektare. Keberadaan terowongan kembar ini dapat mengurangi luas genangan air menjadi 2.761 hektare. "Sekarang progres pembangunannya baru mencapai 22 persen. Tunnel kanan sudah mencapai panjang 97 meter dari 230 meter, sedangkan kiri 100 meter. Tunnel yang dibangun sejak November 2017 ini insya Allah sebelum Desember tahun ini selesai," tutur Hari.

Sementara itu, Kepala BBWS Citarum Bob Arthur Lombogia mengatakan Terowongan Curug Jompong berguna mempercepat aliran air masuk ke Sungai Citarum. Nantinya, luas dan ketinggian genangan air di wilayah cekungan bisa berkurang.

"Jika sebelumnya genangan air di daerah banjir bisa mencapai lima sampai dengan tujuh hari, nanti bisa berkurang menjadi dua hari. Bahkan, di beberapa tempat genangan, segera surut tidak sampai sehabian," katanya.

Selain membangun Terowongan Nanjung, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah mengendalikan banjir di wilayah cekungan Bandung. Di antaranya menormalisasi Sungai Citarum selebar 60 meter di kawasan hulu, membangun Embung Gedebage, Kolam Retensi Cieunteung, dan Sungai Cisangkuy. •

Judul	Sertifikasi Pekerja Konstruksi Ditingkatkan	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 14)		
Resume	MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari sekitar 8 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru 600 ribu atau 7,5 yang bersertifikat. Presiden Joko Widodo pun berharap peningkatan sertifikasi pekerja konstruksi dapat meningkatkan sebanyak 10 kali lipat. Instruksi Presiden ini, kata Basuki, sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian PU-Pera yang kini mulai fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM)		

Sertifikasi Pekerja Konstruksi Ditingkatkan

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari sekitar 8 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru 600 ribu atau 7,5% yang bersertifikat.

Presiden Joko Widodo pun berharap peningkatan sertifikasi pekerja konstruksi dapat meningkat sebanyak 10 kali lipat. Instruksi Presiden ini, kata Basuki, sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian PU-Pera yang kini mulai fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Dalam penyusunan RKP 2020, kita *shifting* kebijakan. Meski

infrastruktur tetap jadi prioritas, sekarang ada kembarannya yaitu program pembangunan SDM besar-besaran mulai tahun 2019. Instruksi Presiden, beliau minta kenaikan 10 kali lipat soal sertifikasi pekerja konstruksi," ujar Basuki saat membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh, Aceh, kemarin.

Sertifikasi itu diharapkan memberikan dampak domino bagi kesejahteraan pekerja konstruksi.

Kementerian PU-Pera sedang mengusahakan peningkatan gaji pekerja konstruksi bersertifikat dengan terus menjalin komunikasi bersama Kementerian Ketenaga-

kerjaan (Kemenaker).

"Saya berharap *take home pay*-nya menjadi lebih baik. Saya sudah minta Dirjen Bina Konstruksi untuk mengusahakan itu sehingga sertifikat ini dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja," imbuhnya.

Khusus di Provinsi Aceh, jumlah tenaga kerja konstruksinya sebesar 166.824 orang atau 2% dari tenaga kerja konstruksi nasional. Namun, hanya sekitar 12,1% pekerja yang bersertifikat atau hanya sekitar 20.129 orang.

Sementara itu, anggaran infrastruktur Kementerian PU-Pera untuk pembangunan fisik di Aceh rata-rata sebesar Rp1,65 triliun.

Nilai tersebut mampu menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 23 ribu orang tiap tahunnya.

Kegiatan sertifikasi sendiri merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian PU-Pera dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyebut kegiatan sertifikasi sangat penting bagi pembangunan di Aceh.

"Acara sertifikasi tenaga pekerja secara tidak langsung dapat membantu pembangunan di Kota Banda Aceh. Saya juga menyampaikan terima kasih karena perhatian membangun Kota Banda Aceh," jelas Aminullah. (Sat/E-2)

Judul	Pembangunan Perumahan Terkendala Anggaran	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 15)		
Resume	Melalui program sejuta rumah, pemerintah berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup target yang dicanangkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menghadapi kendala dalam pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019. Hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran.		

Pembangunan Perumahan Terkendala Anggaran

Melalui program sejuta rumah, pemerintah berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup target yang dicanangkan.

HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menghadapi kendala dalam pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019. Hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PU-Pera Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3), mengatakan alokasi anggaran yang minim itu tidak seimbang dengan target yang terlampau tinggi. "Targetnya dulu itu di RPJMN membangun rusun 550 ribu unit. Tapi kita lima tahun dengan anggaran yang ada cuma mampu mem-

bangun 50 ribu unit. Pak Menteri bilang tidak usah direvisi. Jadi, dengan uang yang ada kita optimalkan," katanya seperti dikutip *Antara*.

Khalawi menuturkan, minimnya alokasi anggaran pemerintah ditambah target yang ada, dipastikan masalah *backlog* (jumlah kebutuhan rumah) tidak akan tuntas dalam lima tahun. Namun, lanjut dia, pemerintah selama empat tahun terakhir terus mencari solusi dan inovasi untuk memenuhi target tersebut, di antaranya dengan program sejuta rumah.

"Jadi, dengan program sejuta rumah ini pemerintah bisa kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup ini (target) karena keuangan negara tidak mencukupi un-

tuk bisa membangun secara langsung," ujarnya.

Selain anggaran minim, lanjutnya, kendala lain yang dihadapi ialah belum maksimalnya regulasi tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Kelangkaan lahan dan kenaikan harga bahan bangunan juga menjadi kendala yang dihadapi. Belum lagi kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan belum sepenuhnya terlaksana. Ditambah lagi banyak kualitas rumah dan perumahan baru di bawah standar.

Lembaga tersendiri

Di sisi lain, menurut Managing Director PT SPS Group Asmat Amin, kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan rumah rakyat sebenarnya bisa diatasi dengan memiliki lembaga tersendiri. Asmat mengambil contoh dari Amerika Serikat dalam pengadaan perumahan untuk rakyatnya melalui lembaga *US Department of House and Urban*

Development. Menurutnya, Indonesia sangat tepat bila mencontoh 'Negara Paman Sam' itu. Pasalnya, dari segi jumlah penduduk hampir sama, yakni Amerika Serikat memiliki 320 juta penduduk dan Indonesia 265 juta penduduk. Yang membedakan, defisit Amerika Serikat hanya 5,6 juta, sedangkan Indonesia 11,4 juta.

"Inilah yang menyebabkan Indonesia harus melihat cara kerja Amerika Serikat dalam membangun rumah bagi rakyatnya," ujar Asmat saat menjadi pembicara dalam rembuk nasional bertajuk Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024 di Jakarta, Selasa (5/3).

Apalagi, diakui Asmat, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak rumah rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal. "Setidaknya, setiap tahun kita membutuhkan 800 ribu unit rumah baru," ujar Asmat.

Menurutnya, capaian pembangunan rumah rakyat yang

dilakukan pemerintah sebanyak 1 juta per tahun dinilai masih belum cukup mengingat jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah setiap tahun, saat ini mencapai 265 juta penduduk.

Dia mengatakan pemerintah harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya dalam membangun rumah rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, perlu dibangun sebanyak 2,5 juta rumah baru.

Menurut dia, dengan daya beli di Indonesia saat ini sekitar 3,8-4 juta per bulan, sepertiganya digunakan hunian, sebenarnya potensi pasar untuk rumah rakyat di Indonesia masih sangat besar.

Asmat juga menyarankan agar Kementerian Perumahan Rakyat berdiri sendiri serta dipimpin orang yang paham mengenai perumahan dan cara kerja sebuah perumahan. "Tujuannya agar pembangunan lebih terfokus dan cepat memenuhi permintaan rumah," pungkasnya. (S-2)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 15)		
Resume	Permukiman Nelayan: Dermaga dan permukiman nelayan Kampung Bahari Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.		



ANTARA/AG STYAWAN

PERMUKIMAN NELAYAN: Dermaga dan permukiman nelayan Kampung Bahari Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 2 Februari 2019, progres pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung untuk pengembangan kawasan permukiman nelayan tahap kedua bernilai investasi sekitar Rp37,6 miliar yang pengerjaannya dimulai sejak 2017 telah mencapai 85% dengan target penyelesaian pada 2019.

Judul	Lima Desa Pertanyakan Ganti Rugi	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 15)		
Resume	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengeluarkan 420 hektar tanah ulayat warga dari hutan produksi yang disiapkan untuk Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga turun-temurun bermukim dan bertani di sana, tetapi tidak mendapat ganti rugi karena masuk hutan produksi.		

BENDUNGAN LAU SIMEME

Lima Desa Pertanyakan Ganti Rugi

MEDAN, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengeluarkan 420 hektar tanah ulayat warga dari hutan produksi yang disiapkan untuk Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga turun-temurun bermukim dan bertani di sana, tetapi tidak mendapat ganti rugi karena masuk hutan produksi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan izin pinjam pakai wilayah itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Izin itu bisa membuat warga tergusur tanpa ganti rugi apa pun.

"Sebanyak 260 keluarga bermukim dan bertani di rencana lokasi Bendungan Lau Simeme yang meliputi lima desa," kata

Ketua Persatuan Arih Ersada Sembol Ginting saat rapat di Kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (11/3/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz itu dihadiri warga terdampak di bawah Persatuan Arih Ersada, Ketua Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Lau Simeme Balai Wilayah Sungai Sumatera II Marwansyah, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I KLHK Rahman Panjaitan, Kepala Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Sumut Effendi Pane, serta Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Deli Serdang Binsar Sitanggung.

Sembol mengatakan, prinsipnya warga lima desa, yakni Desa Rumah Gerat, Sarilaba Jahe, Penen, Mardinding Julu, dan

Kuala Dekah, mendukung pembangunan. Namun, mereka meminta hak ulayat diakui dan diberi ganti rugi layak.

Rahman Panjaitan mengatakan, berdasarkan SK Menteri Kehutanan, lokasi pembangunan Bendungan Lau Simeme merupakan kawasan hutan produksi. "KLHK sudah memberikan izin pinjam pakai kawasan kepada Kementerian PUPR pada 2016," katanya.

Saat ini, KLHK masih berupaya mengeluarkan desa itu dari hutan produksi. "Sebab, di lapangan ternyata ada perkampungan dan ladang," katanya.

Hingga kini, kata Marwansyah, pelaksana proyek pembangunan bendungan, yakni BWS Sumatera II, belum bisa mengeluarkan ganti rugi karena mereka telah dapat izin pinjam pakai dari KLHK. (NSA)

Judul	Tol Dalam Kota Bandung NS Link Bakal Dibangun	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 15)		
Resume	Pembangunan jalan tol dalam kota Bandung, North-South Link atau NS Link, bakal segera dibangun. Infrastruktur yang terintegrasi dengan Jalan Tol Regional Purwakarta-Bandung-Cileunyi ini dinilai bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung.		

INFRASTRUKTUR

Tol Dalam Kota Bandung NS Link Bakal Dibangun

BANDUNG, KOMPAS — Pembangunan jalan tol dalam kota Bandung, North-South Link atau NS Link, bakal segera dibangun. Infrastruktur yang terintegrasi dengan Jalan Tol Regional Purwakarta-Bandung-Cileunyi ini dinilai bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Senin (11/3/2019), menyatakan, pada seksi I dari NS Link akan dibangun jalur sepanjang 3,8 kilometer, menghubungkan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) dari Gerbang Tol Pasir Koja dan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. "Saya memastikan pembangunan jalan ini positif dilaksanakan. Sudah ada titik terang, jalur yang legal dibangun adalah Pasir Koja-Soekarno Hatta, sedangkan yang lain menyusul. Untuk waktu pastinya menunggu keputusan para pimpinan, baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dari pihak provinsi," tuturnya.

Keberadaan jalan tol ini akan menghubungkan Tol Purbaleunyi ke dalam Kota Bandung. Menurut rencana, tol ini akan dibangun sepanjang 14 kilometer dan mengarah ke utara Bandung. Investasinya mencapai lebih dari Rp 8 triliun.

Pembangunan jalan tol ini, tutur Iwa, tetap akan terintegrasi dengan moda angkutan lain, termasuk angkutan

umum. "Kami menunggu masukan dari pemerintah kota. Mereka mengusulkan hingga Jalan Cicaheum. Tentu ada kajian, baik dari teknis jaringan maupun aspek hukum. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Pertumbuhan kendaraan yang tak sebanding dengan ketersediaan jalan membuat kemacetan menjadi permasalahan utama di Ban-

dung. Pembangunan jalan tol layang ini akan menambah ruas jalan di Bandung, tanpa harus membebaskan lahan.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di Bandung.

Rasio kendaraan dan jalan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari menambahkan, kemacetan di Bandung menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan karena rasio perbandingan antara volume kendaraan dan ruas jalan (*V/C ratio*) di Kota Bandung mencapai 1. "Artinya, jika terjadi kemacetan, kendaraan tidak bergerak sama sekali. Untuk kota sebesar Bandung, seharusnya rasio yang bisa diterima adalah 0,5 atau 0,6," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di Bandung. Jalan tol menghubungkan jalur dari satu titik langsung ke titik lain sehingga pergerakan campuran bisa dihindari. Pergerakan campuran ini berasal dari pertemuan kendaraan di perempatan atau persimpangan, terutama dari pinggiran kota.

Kemacetan di pertemuan jalan ini kerap terjadi saat jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari. Bahkan, di beberapa jalan yang terdapat pabrik, kendaraan bisa terhenti lebih dari 20 menit karena lalu lintas pekerja pabrik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Arief Prasetya mendukung penuh pembangunan jalan tol layang di Kota Bandung ini. Ia berujar, persentase penambahan jalan di Bandung kurang dari 0,1 persen. "Jika jalan tol ini dapat dibangun, pecah sudah satu permasalahan. Namun, selain penambahan jalur, kami juga masih memikirkan solusi lain sehingga kemacetan di Bandung bisa diatasi," ujarnya. (RTG)

Judul	7,6 Juta Tenaga Konstruksi Belum Bersertifikat	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 15)		
Resume	Tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi masih minim. Dari 83 juta tenaga konstruksi, baru 616.000 yang terdaftar punya sertifikat kompetensi. Sisanya belum bersertifikat. "Baru 616.000 yang bersertifikat. Dari jumlah itu, yang terampil 400.000," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Aceh, Senin (11/3/2019), di Banda Aceh.		

KILAS DAERAH

7,6 Juta Tenaga Konstruksi Belum Bersertifikat

BANDA ACEH — Tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi masih minim. Dari 83 juta tenaga konstruksi, baru 616.000 yang terdaftar punya sertifikat kompetensi. Sisanya belum bersertifikat. "Baru 616.000 yang bersertifikat. Dari jumlah itu, yang terampil 400.000," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Aceh, Senin (11/3/2019), di Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 tenaga kerja konstruksi, di antaranya tukang, pelaksana, tenaga pengawas, manajemen proyek, dan administrasi kontrak. Sertifikasi dinilai penting agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan kualitas konstruksi terjamin. Sertifikat juga memudahkan tenaga kerja memperoleh pekerjaan dan menjamin kualitas infrastruktur. (AIN)

Judul	Pembangunan Infrastruktur Jakarta Dipercepat	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 21)		
Resume	Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan skema pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kota. Dari proyeksi kebutuhan anggaran Rp571 triliun, pemerintah enargetkan sudah ada gambaran skema detail perproyek di akhir april.		

PENATAAN KAWASAN

Pembangunan Infrastruktur Jakarta D

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan skema pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kota. Dari proyeksi kebutuhan anggaran Rp 571 triliun, pemerintah menargetkan sudah ada gambaran skema detail per proyek di akhir April.

Pembahasan mengenai pembiayaan itu dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2019). Hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, serta pimpinan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menjawab pertanyaan wartawan se usai pertemuan, Anies menuturkan, kesimpulan sidang kabinet beberapa waktu lalu adalah pembangunan sejumlah infrastruktur dasar Kota Jakarta dipercepat dari yang awalnya direncanakan 30-40 tahun menjadi 10 tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

ditugaskan untuk mengerjakannya sekaligus membuat kebutuhan anggarannya.

”Karena mau dikebut, maka dananya harus dikejar. Nah, proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari Rp 571 triliun,” kata Anies.

Adapun proyek infrastruktur dasar kotanya, menurut Anies, meliputi empat bidang, yakni transportasi, air bersih, pengolahan air limbah, dan perumahan. Untuk transportasi, proyeknya setidaknya mencakup empat hal.

Pertama adalah pembangunan jaringan moda raya terpadu (MRT) dari yang saat ini sepanjang 16 kilometer (km) diproyeksikan menjadi 223 km. Kedua adalah pembangunan kereta ringan (*light rail transit/LRT*) dari yang saat ini sepanjang 5,8 km menjadi 116 km. Ketiga adalah melanjutkan pembangunan jaringan bus Transjakarta dari yang saat ini sepanjang 431 km menjadi 2.149 km. Keempat adalah jalur kereta dalam kota yang saat ini sebidang akan dinaikkan sepanjang 27 km.

Untuk air bersih, cakupan saat ini baru 60 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Tar-

getnya, 100 persen terlayani. Untuk pengolahan air limbah, dari yang saat ini mencakup 14 persen penduduk menjadi 81 persen penduduk. Adapun untuk perumahan, targetnya akan dibangun 600.000 unit rumah baru. Ada pula proyek pengendalian banjir.

”Sudah didiskusikan dengan Menteri Keuangan sumber-sumber pembiayaannya. Sudah ketemu sumber-sumbernya. Sekarang kita sedang ada tim kecil yang nanti akan bekerja. Terdiri atas tim dari Pemprov dan Kemenkeu yang nanti akan menyusun perencanaan keuangannya. Sesudah itu nanti kita baru bicara lagi untuk tindak lanjutnya,” kata Anies.

Proyeksi sumber-sumber pembiayaannya, menurut Anies, antara lain berasal dari pinjaman, investasi, serta kemitraan dengan swasta. Salah satu contoh yang bisa digunakan adalah skema pembiayaan proyek MRT. pembiayaannya berasal dari pinjaman Jepang. kewajiban pembayarannya dibagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen dan pemerintah pusat sebesar 49 persen.

Dipercepat

ani.
bah,
p 14
i 81
un-
kan
nah
gen-

Mobilitas penduduk di kota modern mengandalkan transportasi umum massal.

gan
am-
nya.
ber-
ada
kan
dari
rang
ren-
dah
lagi
kata

"Tapi, tidak semua menggunakan skema tersebut," kata Anies.

Saat ditanya perihal pertimbangan percepatan pembangunan infrastruktur, Anies mengatakan, semua pihak ingin masalah-masalah dasar kota be-

res. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dipercepat.

Anies mencontohkan, mobilitas penduduk di kota modern mengandalkan transportasi umum massal. Saat ini, baru 23 persen penduduk DKI Jakarta yang menggunakan kendaraan umum. Ini menurun dari posisi di 1998, yakni 49 persen. "Jadi, sebetulnya makin hari, kita makin menggunakan kendaraan pribadi," kata Anies.

Transportasi publik

Terkait dengan percepatan pembangunan dan penataan kawasan di Ibu Kota, sebelumnya juga sudah dibahas untuk

percepatan mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, integrasi seluruh moda angkutan umum mendesak dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di Ibu Kota dan daerah sekitar. Perluasan jangkauan angkutan umum juga penting ditingkatkan.

Dalam tempo satu bulan mendatang, DKI Jakarta diproyeksikan memiliki dua moda transportasi baru, yakni MRT rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dan LRT rute Kelapa Gading-Velodrom. Kedua moda itu melengkapi sejumlah angkutan umum yang

ada, seperti bus Transjakarta dan KRL Commuterline.

Beragamnya moda transportasi dan operatornya membutuhkan integrasi yang baik agar memudahkan pengguna angkutan umum dalam mobilitasnya.

"Semua (jalur MRT yang terbangun) sudah baik. Tinggal kita memutuskan untuk diperpanjang lagi, minimal 200 kilometer, hingga sepuluh tahun mendatang. Baru semua warga Jakarta terjamin transportasinya," kata Wapres Kalla se usai menjajal MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (20/2/2019) pagi (*Kompas*, 21 Februari 2019). (LAS)

Judul	Kaltim Selesaikan Pengelolaan Limbah	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menyelesaikan sejumlah fasilitas dan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Fasilitas pembuangan dan pengelolaan limbah pun masih harus dituntaskan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin mengatakan bahwa peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang dijadwalkan pada 14 Maret 2019 akan diundur hingga akhir Maret 2019.		

► KEK MALOY BATUTA

Kaltim Selesaikan Pengelolaan Limbah

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menyelesaikan sejumlah fasilitas dan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Fasilitas pembuangan dan pengelolaan limbah pun masih harus dituntaskan.

Gloria F.K. Lawi
gloria.fransisca@bisnis.co.id

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin mengatakan bahwa peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang dijadwalkan pada 14 Maret 2019 akan diundur hingga akhir Maret 2019.

Dia menyatakan secara umum semua fasilitas dan infrastruktur sudah selesai. Hanya saja, yang masih dalam penyelesaian adalah saluran pembuangan limbah atau sistem pengelolaan limbah.

Adapun, yang sudah beres, kata Fuad antara lain 'gerbang, kelembagaan, dan kelengkapan kawasan. "Semua sudah, tinggal yang saluran pembuangan," kata Fuad saat dihubungi melalui telepon, Senin (11/3).

Dia menyatakan nantinya peresmian KEK MBTK akan berlangsung secara *teleconference* dari Bitung. Lokasi peresmian di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Fuad menyatakan setelah peresmian KEK MBTK, pengoperasian bisa langsung dikerjakan oleh Perusahaan Daerah (Perusda) PT Melati Bhakti Satya (MBS) selaku perusahaan daerah yang menjadi operator. Selain itu semua insentif yang telah ditetapkan bisa langsung diberlakukan kepada perusahaan pengguna fasilitas KEK.

Bisnis mencatat, ada beberapa insentif yang akan diberikan di KEK MBTK, untuk kegiatan utama pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu, ada pengurangan PPh sebesar 20% sampai 100% selama

10—25 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu ada pula pengurangan PPh 20%—100% selama 5 tahun sampai 15 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp500 miliar. Sementara itu untuk kegiatan lainnya seperti logistik dan aneka industri ada *tax allowance* berupa pengurangan penghasilan *netto* sebesar 30% selama 6 tahun. Dikenakan pula PPh atas dividen sebesar 10%.

Berdasarkan rencana, KEK Maloy ditargetkan bisa mendulang investasi sampai Rp34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur sampai Rp4,67 triliun per tahunnya hingga 2025.

"Kalau perusahaan beroperasi di luar dari kawasan itu maka bisa terkena beban pajak. Biaya lain penuh, kalau beroperasi disitu maka ada potongan. Itu yang dicari perusahaan supaya bisa," ujar Fuad.

DIUNDUR

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menyatakan KEK MBTK dan beberapa KEK lain menang diundur peresmian antara 26 Maret—31 Maret 2019.

Menurut Enoch, pengunduran ini memang sesuai dengan usulan kepala daerah Sulawesi Utara.

Terkait ketidaksiapan sistem pengelolaan limbah di KEK MBTK, Enoch berujar bahwa secara prinsip ada tiga komponen prasyarat kesiapan operasi. *Pertama* adalah infrastruktur dan fasilitas, *kedua* adalah kelembagaan, dan *ketiga* adalah perangkat pengendali.

Adapun, sistem pengolahan limbah masuk dalam kategori perangkat pe-

► Rencana peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan mundur dari jadwal.

ngendali atau Tata Tertib Kawasan (*Estate Regulation*) sesuai aturan dari administrator yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Sistem pengelolaan limbah harus masuk dalam *Estate Regulation*. Pengelolaan limbah apakah terpusat, atau dikelola oleh masing-masing investor. Klausulnya ada di *Estate Regulation*," kata Enoch kepada *Bisnis*.

Dilansir dari Keppres No. 5/2015 tentang Dewan Kawasan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/2018 Tentang KEK MBTK, maka administrator adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab atau administrator dari KEK MBTK.

"Untuk jangka pendek setahu saya, [pengolahan limbah] sudah masuk dalam *Estate Regulation* bahwa pengelolaan limbah oleh masing-masing investor," paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusda MBS, Agus Dwitarto menyatakan secara umum KEK MBTK siap beroperasi. Saat ini terkait perusahaan yang akan masuk ke KEK MBTK, Agus menegaskan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berdomisili di areal KEK serta menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan untuk Lahan Industri (SPPLI).

"Mengapa? Setiap perusahaan yang terkait dengan produk turunan CPO jika ingin mengembangkan usahanya di KEK MBTK pasti ingin kemudahan fiskal dan non fiskal," terangnya kepada *Bisnis*.

Bagi para calon pengguna fasilitas, Agus mengimbau setelah peresmian KEK MBTK wajib datang ke kantor administrator dan kantor pengelola KEK MBTK untuk sosialisasi hak dan kewajiban penggunaan fasilitas. 

Judul	WSKT & MPLN Garap Lahan 300 Hektare	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Terbaru Pt Waskita Karya Tbk. (WSKT) menggandeng PT Moderland Realty Tbk. (MDLN) bakal menyulap lahan sekira 300 hektare di Bekasi menjadi kawasan pergudangan dan property. Sementara itu, di Subang, PT Lintas Marga Sadaya, operator jalan Cikopo-Palimanan (Cipali), juga mendapat permintaan pembukaan akses tol untuk kawasan industry dari tiga calon investor.		

► PENGEMBANGAN KAWASAN

WSKT & MDLN Garap Lahan 300 Hektare



Bisnis, JAKARTA — Bak gula dan semut, tren pengembangan kawasan seturut dengan pembangunan jalan tol sejak 30 tahun lalu kini terus berlanjut. Kesuksesan kawasan industri di Bekasi dan Serang yang hidup berkat akses langsung ke jalan tol diperkirakan merembet ke wilayah lain.

milik MDLN.

PT Waskita Modern Realty bakal membeli lahan seluas 349 hektare milik anak usaha MDLN dengan nilai sebelum pajak Rp1,10 triliun.

Saat ini, proyek jalan tol Cibitung—Cilincing sepanjang 54,70 kilometer berada dalam tahap konstruksi.

Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Thorry Hendriarto mengatakan bahwa pembangunan jalan tol tersebut dijadwalkan rampung pada akhir tahun ini.

"Setelah beroperasi, nantinya jalan tol ini bisa membuka peluang ekonomi baru, seperti kawasan industri dan pariwisata," jelasnya.

Kawasan industri di Bekasi saat ini terfokus di wilayah yang dekat dengan akses jalan tol Jakarta—Cikampek. Pasalnya, jalan tol yang sudah beroperasi sejak 1988 itu menjadi akses tol utama untuk menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun, jalan tol Cibitung—Cilincing akan menjadi akses alternatif dari kawasan industri di Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

TOL CIPALI

Pada perkembangan lain, minat investor untuk mengembangkan kawasan di sekitar jalan tol juga merembet ke Subang, terutama sejak jalan tol Cipali beroperasi pada 2015.

Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sadaya Firdaus Azis mengatakan bahwa perseroan tengah melakukan peninjauan dengan tiga perusahaan yang hendak membuka simpang susun atau di lintas jalan tol Cipali.

Dia menyebutkan bahwa perusahaan yang berminat berasal dari kalangan investor asing, institusi swasta, dan per-

menggarap lahan di Bekasi bagian utara yang tak terpaat jauh dengan jalan tol Cibitung—Cilincing.

Jalan tol yang menghubungkan kawasan industri di Cibitung dengan Pelabuhan Tanjung Priok itu digarap oleh cucu usaha WSKT, yakni PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

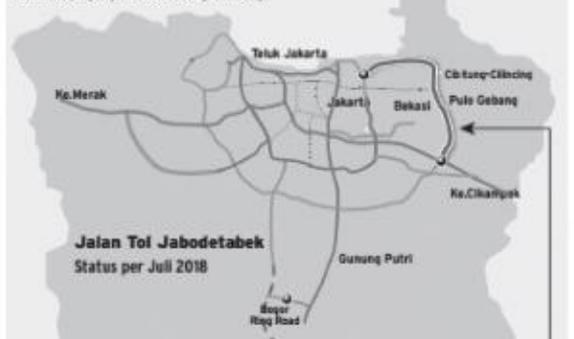
Dia menjelaskan bahwa pengembangan kawasan di sekitar jalan tol dan pengoperasian jalan tol merupakan simbiosis mutualisme. Properti yang dikembangkan akan mendapat akses langsung ke jalan tol sehingga lebih mudah dijangkau, sedangkan bagi operator jalan tol, keberadaan kawasan bakal memantik volume lalu lintas.

"Alangkah ruginya kita kalau punya jalan tol, tapi tidak bisa memanfaatkan turunannya. [Dengan pengembangan kawasan], kita akan saling menghidupi," ujarnya saat berkunjung ke redaksi *Bisnis Indonesia*, Senin (11/3).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dilansir *Modernland*, 9 Maret 2018, WSKT dan MDLN telah bersepakat membentuk perusahaan patungan bernama PT Waskita Modern Realty. Sebanyak 60% saham Waskita Modern Realty dimiliki Waskita, sedangkan sisanya

Memanfaatkan Kawasan di Sekitar Tol

Jalan tol Cibitung—Cilincing merupakan satu dari 13 proyek jalan tol yang sudah, sedang, dan akan dikembangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. melalui anak usahanya, yakni PT Waskita Toll Road. Tak hanya membangun jalan tol dan selanjutnya menjualnya, perseroan juga berencana membangun kawasan berintegrasi di kawasan yang dimilikinya di sekitar jalan tol. Salah satunya berada di proyek jalan tol Cibitung—Cilincing.



Progres Jalan Tol Cibitung—Cilincing per 22 Februari 2019

Sekel	Segmen	Panjang (Km)	Progres Pengerjaan Lahan (%)	Progres Fisik (%)
Sekel 1	SS Cibitung—SS Telaga Asih	12,77	86,55	55,66
Sekel 2	SS Telaga Asih—SS Tambus Utara	8,05	74,86	58,60
Sekel 3	Tambus Utara—Teruma Jaya	10,64	61,86	35,34
Sekel 4	Teruma Jaya—Cilincing	4,56	0	0

► WSKT dan MDLN telah bersepakat membentuk perusahaan patungan bernama PT Waskita Modern Realty.

► Calon investor berminat membuka kawasan industri dan destinasi wisata di area yang dekat dengan jalan tol Cipali.

usahaan milik negara.

Menurut Firdaus, calon investor berminat membuka kawasan industri dan destinasi wisata di area yang dekat dengan jalan tol Cipali.

Firdaus enggan mengungkapkan identitas calon mitra perusahaannya dalam

pembukaan akses karena masih dalam tahap peninjauan.

"Mereka ingin buka akses [dari tol Cipali]. Saat ini masih tahap diskusi. Tentunya dengan perkembangan wilayah, ini akan menjadi bisnis yang menarik," kata Firdaus. □

Judul	LMAN Kembalikan Rp32,21 Triliun	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Lembaga Manajemen Aset Negara telah membayar biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional jalan tol sejumlah Rp32,21 triliun dari tagihan Rp59,39 triliun. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran Rp32,21 triliun yang berasal dari tiga alokasi tahun anggaran yakni tahun anggaran 2016,2017, dan 2018.		

► DANA TALANGAN TOL 2016–2018

LMAN Kembalikan Rp32,21 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara telah membayar biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional jalan tol sejumlah Rp32,21 triliun dari tagihan Rp59,39 triliun.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran PSN jalan tol senilai Rp32,21 triliun yang berasal dari tiga alokasi tahun anggaran yakni tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018.

“Untuk PSN jalan tol tahun anggaran 2016 realisasinya Rp13,60 triliun, 2017 itu realisasinya Rp18,14 triliun, dan 2018 itu realisasinya Rp0,47 triliun,” ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Apabila diperinci, menurut data LMAN per 1 Maret 2019, pada tahun anggaran 2016 LMAN telah membayar Rp13,60 triliun dari tagihan Rp13,90 triliun, untuk tahun anggaran 2017 telah dibayarkan Rp18,14 triliun dari tagihan Rp25,26 triliun, dan tahun anggaran 2018 telah dibayarkan Rp0,47 triliun dari tagihan Rp0,59 triliun.

Adapun, sisanya masih terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol serta permasalahan tanah karakteristik khusus seperti tanah kas desa, dan tanah Perum Perhutani. Selain jalan

tol, LMAN juga telah membayarkan biaya pembebasan lahan proyek bendungan tahun anggaran 2017 senilai Rp1,99 triliun atau 83,88% terhadap alokasi biaya Rp2,38 triliun.

Menurut Rahayu, realisasi pembayarannya terdiri atas Rp1,04 triliun berupa pembayaran langsung dan Rp958,53 miliar merupakan dana talangan tanah yang ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor. Realisasi yang sudah dibayarkan tersebut 98,12% dari total tagihan yang ditujukan kepada LMAN.

“LMAN sudah membayar Rp1,99 triliun dari yang ditagihkan saat ini mencapai Rp2,03 triliun.”

Adapun, sisa yang ditagihkan dan tengah diproses oleh LMAN, tuturnya, mencapai Rp217 juta yang merupakan skema pembayaran langsung.

Sementara itu, kata Rahayu, jumlah pembayaran pada skema pembayaran langsung yang harus dibayar LMAN mencapai Rp19,88 miliar dan rekonsiliasi mencapai Rp12,60 miliar.

Pada skema dana talangan tanah, jumlah pembayaran yang tengah dalam tahapan kelengkapan dokumen oleh PPK mencapai Rp5,61 miliar.

LMAN menganggarkan Rp2,38 triliun pada 2017 untuk pembayaran pembebasan 6.758 bidang tanah proyek bendungan. *(Krizia P. Kinanti)*

Judul	Berita Foto: Pekerja Konstruksi Bersertifikat	Tanggal	Selasa, 12 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Pekerja menghadiri pembukaan Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Banda Aceh.		

► PEKERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT



Antara/kompas

Pekerja menghadiri pembukaan Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Banda Aceh, Senin (11/3). Kementerian PUPR menargetkan pada tahun ini jumlah tenaga

kerja konstruksi yang memiliki sertifikat mencapai 600.000 pekerja, termasuk di antaranya 1.000 tenaga kerja di Aceh dari total target nasional sebanyak 8,3 juta tenaga kerja konstruksi.